

## Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun

Eka Maslukha<sup>\*1</sup>, Daryono<sup>2</sup>, M. Bayu Firmansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

E-mail: [ekamaslucha@gmail.com](mailto:ekamaslucha@gmail.com), [daryono.jarwo@gmail.com](mailto:daryono.jarwo@gmail.com), [firmansyahbayu970@gmail.com](mailto:firmansyahbayu970@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-04	Early marriage remains a concerning social issue in Indonesia, particularly in rural areas. This study aims to identify the factors influencing the occurrence of early marriage and to analyze its impact on the continuation of education in the era of the 12-year compulsory education program. The research employed a qualitative method with data collected through interviews. The findings indicate that the main determinants of early marriage are economic conditions, cultural and religious norms, social pressure, and low awareness of the importance of education. The impact on education is highly significant, including an increase in school dropout rates, limited access to secondary education, and a decline in the quality of human resources. These factors hinder the achievement of national education goals and widen social inequality. From a social perspective, the negative impacts include reduced personal development freedom and limited opportunities for higher education. From a health perspective, early marriage often occurs before physical and emotional maturity is reached, leading to higher divorce rates and increased pregnancy risks—particularly among girls who tend not to continue to senior high school or its equivalent. On the other hand, the perceived positive impacts include preventing adultery and reducing the financial burden on parents. These findings highlight the importance of education-based policy interventions and gender equality awareness campaigns to reduce the incidence of early marriage and support the success of the 12-year compulsory education program.
<b>Keywords:</b> <i>Early Marriage; Education; Socioeconomic Factors; 12-Year Compulsory Education.</i>	
<b>Artikel Info</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-04	
<b>Kata kunci:</b> <i>Pernikahan Dini; Pendidikan; Faktor Sosial Ekonomi; Wajib Belajar 12 Tahun.</i>	
	<b>Abstrak</b> Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini serta menganalisis dampaknya terhadap kelanjutan pendidikan pada era wajib belajar 12 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penentu utama pernikahan dini adalah kondisi ekonomi, norma budaya dan agama, tekanan sosial serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dampaknya terhadap pendidikan sangat signifikan, yakni meningkatnya angka putus sekolah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional dan memperbesar kesenjangan sosial. Dampaknya negatifnya jika ditinjau dari segi sosial, dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri dan mengurangi kesempatan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan adalah kematangan psikologis belum tercapai, sehingga menyebabkan tingkat perceraian tinggi, serta meningkatkan resiko kehamilan, terutama bagi perempuan, yang cenderung tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat. Sedangkan dampak positifnya menghindari zina dan mengurangi beban orang tua. Temuan ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan berbasis pendidikan dan sosialisasi kesetaraan gender untuk menekan angka pernikahan dini serta mendukung tercapainya program wajib belajar 12 tahun.

### I. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia matang secara fisik, psikologis, sosial maupun ekonomi. Masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Artikel yang berjudul "Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kelanjutan Pendidikan dalam Era Wajib Belajar 12 Tahun", mengandung dua fokus utama: pertama, upaya untuk mengidentifikasi faktor penentu yang mendorong

terjadinya pernikahan dini. Kedua, menganalisis bagaimana pernikahan dini memengaruhi kelanjutan pendidikan remaja dalam konteks kebijakan nasional wajib belajar selama 12 tahun. Karena pendidikan hingga jenjang menengah atas dianggap sebagai pondasi pembangunan sumber daya manusia, maka keberadaan pernikahan dini dapat menjadi hambatan signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Beberapa penelitian dan kerangka teori sebelumnya menjadi pijakan penting dalam memahami fenomena ini. Misalnya, dalam studi sistematis oleh Nur, Amanda, Hanifa & Ayudiputri (2024) ditemukan bahwa pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan, norma budaya dan agama, serta penegakan hukum yang lemah.

Kerangka teori yang lebih spesifik juga relevan untuk analisis faktor penentu. Misalnya, teori ekologi sosial "social ecological framework" yang digunakan oleh Kartika, Efendi & Normelani (2024) dalam penelitian mereka di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa faktor individual (seperti tingkat pendidikan dan status kerja) dan faktor interpersonal (seperti pendidikan dan pekerjaan ayah serta ekonomi rumah tangga) bersama-sama memengaruhi kematangan usia perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah pendidikan remaja dan orang tua, serta semakin terbatas kondisi ekonomi, maka peluang terjadinya pernikahan dini meningkat signifikan.

Berdasarkan teori penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini dalam era wajib belajar 12 tahun, dampak pernikahan dini terhadap kelanjutan pendidikan remaja khususnya di wilayah pedesaan, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis pendidikan dan kesetaraan gender guna mendukung pencapaian program wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis empiris dan teoretis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi para pemangku kebijakan untuk merancang intervensi yang tepat dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan

data melalui wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampaknya terhadap kelanjutan pendidikan remaja, serta memperoleh perspektif dari pengalaman dan pandangan informan yang terlibat.

Penelitian dilakukan di Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang memiliki tingkat pernikahan dini relatif tinggi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2025, dengan pertimbangan jadwal wawancara dengan informan.

Data penelitian diperoleh dari informan. Informan kunci meliputi remaja yang menikah dini, orang tua, tokoh masyarakat, guru dan pejabat desa terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali pengalaman dan motivasi remaja menikah dini, serta pandangan orang tua dan masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

**Tabel 1.** Karakteristik Informan

No	Informan Penelitian	N	N (Orang)
1	Pasangan Usia Muda	3	6
2	Orang Tua Pasangan Muda	3	3
3	Penghulu Desa	1	1
4	Guru Bk SMP 3 Grati Satap	1	1
5	Tokoh Masyarakat	2	2

Wawancara menunjukkan beberapa faktor utama mendorong terjadinya pernikahan dini di desa Plososari.

1. Faktor Ekonomi adalah keluarga kesulitan membiayai pendidikan akibat faktor pekerjaan.
2. Norma dan Budaya adalah tekanan dan keyakinan masyarakat setempat untuk menikah muda.
3. Tekanan Sosial atau Lingkungan adalah lingkungan menormalisasi pernikahan dini "pernyataan informan" teman-teman sebaya saya sudah menikah jadi saya ikut menikah".
4. Rendahnya Kesadaran Pendidikan adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan "pernyataan informan" saya tidak paham pentingnya melanjutkan sekolah, orang tua saya juga kurang memberikan saran, kata orang tua saya ujung-ujungnya didapur"
5. Faktor Lainnya adalah pengaruh media sosial dan pergaulan.

Hasil penelitian menunjukkan dampak signifikan terhadap kelanjutan pendidikan remaja di desa Plososari antara lain:

1. Dampak Negatif

a) Putus sekolah

Ditinjau dari segi sosial dengan pernikahan dini mengurangi kebebasan pengembangan diri dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan oleh pasangan muda dan orang tua pasangan usia muda. Pernyataan informan "saya berhenti sekolah karena sudah menikah dan harus membantu keluarga"

b) Penurunan Kualitas Sumberdaya Manusia

Ditinjau dari segi sosial ekonomi dengan banyaknya remaja menikah dini, kemampuan literasi mereka menjadi rendah.

2. Dampak Positif

a) Menghindari Zina (Pergaulan Bebas), jika ditinjau dari segi religious maka dampak positifnya adalah remaja dapat terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi.

b) Mengurangi beban orangtua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan bahwa jika menikah muda Ketika menginjak usia tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

## B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Sebagian besar remaja menikah karena keterbatasan ekonomi. Orang tua menganggap pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban finansial keluarga dan menjamin masa depan anak melalui pasangan yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan teori Gary Becker (1991) tentang economic approach to family behavior, yang menjelaskan bahwa Keputusan menikah seringkali dilandasi pertimbangan ekonomi rasional. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan bahwa 5 dari 6 informan mengatakan bahwa orang tua saya kesulitan membiayai sekolah karena hanya seorang buruh tani, jadi saya memutuskan untuk menikah agar orang tua saya tidak terbebani dalam membiayai.

2. Faktor Norma dan Budaya

Selain faktor ekonomi, faktor norma budaya juga menjadi pendorong kuat dalam masyarakat Desa Plososari, meikah muda dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma agama dan budaya sekaligus menghindari perilaku yang dianggap menyimpang. Pandangan ini konsisten dengan hasil studi Nur et al (2024), yang menyebut bahwa norma adat dan religiusitas menjadi variable penting mengambil keputusan menikah muda di Indonesia.

3. Rendahnya kesadaran Pendidikan

Rendahnya kesadaran pendidikan memperkuat praktik pernikahan dini. Sebagian besar informan Perempuan tidak menyadari pentingnya pendidikan lanjut untuk meningkatkan taraf hidup. Menurut informan "sama saja ketika wanita menikah dini ataupun tidak ujung-ujungnya tetap di dapaur da mengurus suami". Temuan ini memperkuat teori Human Capital oleh Schultz (1961), yang menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan teori yang digunakan tersebut, penelitian menemukan bahwa faktor penyebab pernikahan dini tidak hanya bersifat ekonomi dan budaya saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor struktural seperti:

1. Kurangnya pengawasan sekolah terhadap sekolah dan Lembaga pendidikan terhadap siswa beresiko menikah dini.
2. Minimnya program penyuluhan Kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender ditingkat desa
3. Keterbatasan akses terhadap pendidikan (paket B dan C) bagi pasangan muda

Temuan ini melengkapi teori Backer (1991) dan Schultz (1961), bahwa pendidikan bukan hanya faktor ekonomi individual, melainkan produk dari interaksi sosial, kebijakan public dan norma local.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penentu terjadinya pernikahan dini adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah, kuatnya pengaruh norma budaya dan agama, tekanan sosial lingkungan serta minimnya

kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sehingga menciptakan pola sosial Dimana remaja Perempuan khususnya dianggap lebih baik menikah muda daripada melanjutkan sekolah.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa pernikahan dini berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan dalam era wajib belajar 12 tahun. Sebagian besar remaja yang menikah dini mengalami putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga, keterbatasan ekonomi dan gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini secara nyata menghambat pencapaian program wajib belajar 12 tahun dan menurunkan kualitas sumberdaya manusia.

Sehingga untuk menekan angka pernikahan dini memerlukan pendekatan yang holistic, tidak hanya melalui kebijakan pendidikan tetapi juga melalui intervensi sosial, ekonomi dan budaya yang melibatkan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat serta pemerintah daerah. Dengan demikian tujuan nasional untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dapat tercapai secara lebih efektif.

## B. Saran

### 1. Bagi Pemerintah

- a) Perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan 12 tahun melalui program yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.
- b) Membuat regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terkait batas usia minimal pernikahan serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
- c) Menyediakan fasilitas pendidikan alternatif seperti kejar paket, beasiswa, dan sekolah ramah anak untuk memastikan anak yang pernah menikah dini tetap memiliki akses pendidikan.

### 2. Bagi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

- a) Mengembangkan program pendidikan reproduksi dan konseling remaja yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang risiko pernikahan dini.
- b) Mengadakan pelatihan untuk guru dalam memberikan pendekatan yang sensitif, inklusif, dan edukatif terkait isu pernikahan dini.
- c) Meningkatkan kerja sama dengan pihak orang tua dan instansi terkait untuk

memantau risiko pernikahan dini dan memfasilitasi pencegahannya.

### 3. Bagi Keluarga

- a) Orang tua perlu lebih aktif memberikan pendidikan moral, komunikasi terbuka, serta pendampingan bagi anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.
- b) Keluarga diharapkan mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin dan tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi atas masalah ekonomi atau sosial.

### 4. Bagi Masyarakat

- a) Tokoh masyarakat dan pemuka agama sebaiknya terlibat dalam kampanye pencegahan pernikahan dini dengan menekankan nilai-nilai perlindungan anak.
- b) Lingkungan sosial perlu menciptakan budaya yang mendukung pendidikan jangka panjang dan mengurangi stigma terhadap remaja yang memilih menunda pernikahan.

## DAFTAR RUJUKAN

Backer, G.S. (1991). A.Treatise on the Family. Havard University Press

Daryono, D., & Firmansyah, M. B. (2021). Public Relations Promotion Strategy for Higher Education in the Era of Society 5.0. Praniti Wiranegara (Journal on Research Innovation and Development in Higher E Julia, A., & Hapsari, R. E. D. P. Landasan Sosiologis Sebagai Landasan Pelaksanaan Program MBKM. Landasan Pendidikan Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Konsep dan Aplikasi), 47.ducation), 1(1), 10-25.

Daryono, D., Firmansyah, M. B., Mariyanti, M., Budiman, M. F., Muhamir, A., Muthoharoh, D., ... & Slamet, M. (2021). Kontribusi Landasan Pendidikan dalam Aspek Humas Pendidikan. Lembaga Academic & Research Institute.

Daryono, D., Fuat, F., Firmansyah, M. B., Ahsana, A., Rokhmawan, T., Nuraishah, R., & HADI, S. (2020). Panduan pembelajaran via simulasi digital (SIMDIG). Lembaga Academic & Research Institute.

- Dayono, M. P., Firmansyah, M. B., Anwar, C., Faizah, F. N., Ahzab, M. S., Kurniawati, E., ... & PS, P. W. (2022). Konsep Dan Aplikasi Landasan Pendidikan Dalam Sekolah Penggerak. Lembaga Academic & Research Institute.
- Kartika, N.Y., Efendi, M., Normelani, E., Nurhidayah, N., 2024. Determinants of Adolescent Marriages Inhibiting the Maturing of Marriage Age. GeoEco
- Nur, A.A., Amanda, S., Hanifa, F.F., Ayudiputri, Z.Z., 2024. Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review. Journal of Community Medicine and Public Health Research, 5(2): 216 227.
- Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*